

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdussalam, H.R., dan Desasfuryanto, Adri, *Victimology (Ilmu tentang Korban)*, Jakarta: PTIK Press, 2018
- Ali, Mahrus dan Nurhidayat, Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat: in Court System & out Court System*, Depok: Gramata Publishing, 2011
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
- Baderin, Mashood A. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta:
- Baskara T. Wardaya, *Luka Bangsa Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi*, Yogyakarta: Percetakan Galangpress, 2014
- Darmawan, M. Kemal, *Materi Pokok Teori Kriminologi*, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017
- Kurniawan et al, *Pengakuan Algojo 1965*, Jakarta: Tempo publisihing, 2014
- Hiariej, Eddy O.S. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009
- Mastura, Rusdy. *Palu & Godam Melawan Keangkuhan: Kisah di Balik Permohonan Maaf pada Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 – 1966*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Prastowo, R.B. Budi dan Rismawati, *Percikan Gagasan tentang Hukum V Hak Asasi Manusia*, Bandung: Unpar Press, 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015
- Sujatmoko, Andrey. *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Zainal Abidin, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat*, Jakarta: Komnas HAM RI, 20

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

\_\_\_\_\_. *Kapita Selekta*, Jakarta: Miswar, 2011

\_\_\_\_\_, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

\_\_\_\_\_, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Yohanes da Masenus Arus, Rudi M. Rizki, Kusnanto Anggoro, Karlina Loksono-Supelli, JB. Banawiratama, Ihdhal Kasim, Dhaniel Dhakidae, Asvi Warman Adam, Agus Putri, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Jakarta: Elsam, 2003

**Jurnal:**

Penny Naluria Utami, *Pemulihan Hak Ekonomi dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Talangsari 1989*, Jurnal HAM Volume 8 No 1, Juli 2017

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 14, No. 2, Desember 2017

Andrey Sujatmoko, *Hak Atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, 2016

Leigh-Ashley Lipscomb, *Beyond the Truth: Can Reparations Move Peace and Justice Forward in Timor-Leste*, Analysis from the East-West Center, No 93, March 2010

Irine Istiningsih Hadiprayitno, *Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia*, Human Rights Review, 11, 2010

Ken Setiawan, *From Hope to Disillusion: The Paradox of Komnas HAM, the Indonesian National Human Rights Commission*, Bijdragen Toot De Taal, 172, 2016

Nathaniel Umokoro, *Human Rights Violations and Transitional Justice in Nigeria's Niger Delta during Civilian Rule - A Focus on the Fourth Republic*, Journal of Global South Studies, Vol. 35, No 1, 2018

Priyambudi Sulistiyanto, *Politics of Justice and Reconciliation in Post-Suharto Indonesia*, Journal of Contemporary Asia, Vol 37, 1, Feb 2007

Suh Jiwon, *Preemptive Transitional Justice Policies in Aceh, Indonesia*, Southeast Asian Studies, Vol 4, No 1, April 2015

Tom Parker, *Redressing the Balance: How Human Rights Defenders Can Use Victim Narratives to Confront the Violence of Armed Groups*, Human Rights Quarterly, 33, 2011

Rafael Escudero, *Road to Impunity: The Absence of Transitional Justice Programs in Spain*, Human Rights Quarterly, 36 (2014)

Murat Tumay, *The Ability of European Convention on Human Rights in Preventing Gross Violations of Human Rights*, Journal of Institute of Social Sciences, Vol 31, 2014

Rebecca Strating, *The Indonesia-Timor-Leste Commission of Truth and Friendship: Enhancing Bilateral Relations at the Expense of Justice*, Temporary Southeast Asia, Vol 36, No 2, 2014

Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan HAM dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 Nomor 2, Mei 2013

Semendawai, Abdul Haris, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional)*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 2: April 2009: 253 - 267

Wiratraman, R. Herlambang P, *Akses Keadilan bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PPU-IV/2006*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, 2013

#### **Makalah:**

Nurhidayatulloh, *Gross Violation of Human Rights: Praktik Pengadilan HAM Internasional dan Putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM di Jakarta pada 3-6 Juni 2015

#### **Tesis dan Disertasi:**

Firanti, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Gabriela Echeverria, 2017, *The UN Principles and Guidelines on Reparation: Is There an Enforceable Right to Reparation for Victims of Human Rights and International Humanitarian Law Violations*, A thesis submitted for the degree of Doctor in Philosophy, Departement of Law, University of Essex

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3886

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4429.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5602

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4171.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Asasi Manusia Yang Berat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4172.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5772.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6184.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.*

\_\_\_\_\_. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Bantuan Kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jejak Pendapat di Daerah Propinsi Timor Timur.*

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

#### **Instrumen HAM Internasional**

Resolution adopted by the General Assembly on 29 November 1985, 40/34. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2005, 60/147. *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.*

Rome Statute of the International Criminal Court

Impunitas